

**PENGARUH MORALITAS, MOTIVASI DAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN TERHADAP KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN
(Studi Empiris pada SKPD di Kota Solok)**

ARTIKEL



OLEH :

GUSNARDI KURNIAWAN

00385/2008

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

Wisuda Periode September 2013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENGARUH MORALITAS, MOTIVASI, dan SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP
KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN**
(Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kota Solok)

Oleh :

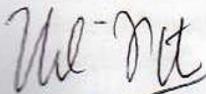
GUSNARDI KURNIAWAN

00385 / 2008

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi/tesis untuk persyaratan wisuda periode September 2013 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing.

Padang, Agustus 2013

Pembimbing I



Nelvirita SE, M.Si, Ak
NIP. 19740706 199903 2 002

Pembimbing II



Erly Mulyani SE, M.Si, Ak
NIP. 19781204 200801 2 011

Pengaruh Moralitas, Motivasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

(Studi Empiris pada SKPD Kota Solok)

Gusnardi Kurniawan

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email :gusnardikurniawan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: 1) Pengaruh moralitas aparatur pemerintah terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan. 2) Pengaruh motivasi negatif aparatur pemerintah terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan. 3) Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan. Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Kota Padang. Pengambilan sampel secara *total sampling*, dengan responden kepala dan staf akuntansi SKPD. Data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda dengan bantuan *Statistical Package For Social Science* (SPSS). Kesimpulan penelitian menunjukkan: 1) Moralitas berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan, dimana $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-2,680 < 2,2075$ (sig 0,009 < α 0,05) yang berarti H_1 diterima. 2) Motivasi negatif berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan, dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,016 > 2,2075$ (sig 0,004 < α 0,05) yang berarti H_2 diterima. 3) Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan, dimana $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-3,369 < 2,2075$ (sig 0,001 < α 0,05) yang berarti H_3 diterima. Saran dalam penelitian ini adalah: 1) Bagi seluruh instansi pemerintah agar moral/kepribadian yang bagus dapat di terapkan pada instansinya maka pedoman dalam berperilaku sesuai dengan peraturan harus ditegakkan sehingga untuk melakukan kecurangan dalam instansi tersebut bisa dicegah, aset milik pemerintah ditertibkan lagi penggunaannya agar motivasi negatif/dorongan seseorang untuk melakukan kecurangan dapat dicegah, dengan menerapkan tingkat kompetensi dan menciptakan kepemimpinan yang kondusif serta pengawasan yang terus menerus dan periodik dalam menilai kualitas pengendalian intern maka kecurangan juga dapat dicegah. Pada intinya untuk mencegah kecurangan tidak terjadi di instansi pemerintah sebaiknya dimulai sejak menerima seseorang (*recruitment process*) sebagai pegawai yang dilakukan melalui seleksi yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). 2) Bagi peneliti selanjutnya, dapat menambah variabel penelitian seperti kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi dan variabel-variabel lainnya yang mungkin berpengaruh kuat dengan kecurangan dalam laporan keuangan serta mengurangi pernyataan negatif karena responden kurang bisa menjawab dengan tepat.

Kata kunci: Moralitas, Motivasi, Sistem Pengendalian Intern, Kecurangan Laporan Keuangan.

Abstract

This study aimed to examine : 1) The effect on the level of morality of government officials in the financial statement fraud . 2) The effect of negative motivation of government officials to the level of fraud in the financial statements . 3) Effect of internal control system of the level of fraud in the financial statements. This type of research digolongkan as causative descriptive research . The population in this study is the Local Government Unit (on education) in the city of Padang . Total sampling sampling , the respondent and the head of the accounting staff on education . Data were collected by distributing questionnaires directly . The data analysis technique used is multiple regression with the help of Statistical Package For Social Science (SPSS) . Research conclusion shows : 1) Morality significant negative effect on the level of fraud in the financial statements , where $t < t$ table is $-2.680 < 2.2075$ (sig 0.009 < α 0.05) which means that $H1$ is accepted . 2) Negative motivation positive significant effect on the level of fraud in the financial statements , where $t > t$ table is $3.016 > 2.2075$ (sig 0.004 < α 0.05) which means that $H2$ is accepted . 3) The system of internal control significant negative effect on the level of fraud in the financial statements , where $t < t$ table is $-3.369 < 2.2075$ (sig 0.001 < α 0.05) which means $H3$ is accepted Suggestions in this study were : 1) For all the government agencies that moral / good personality can be applied at the institution behave in accordance with the guidance in the rules must be enforced so as to commit fraud in the agency can be prevented , more disciplined government -owned assets in order to motivate their use negative / urge someone to commit fraud can be prevented , by applying the level of competency and leadership create a conducive and continuous monitoring and periodic in assessing the quality of internal control fraud can be prevented . In essence to prevent cheating does not happen in government agencies should begin receiving one (recruitment process) as employee selection is done through a clean free from corruption , collusion and nepotism (KKN) . 2) For further research , can add variables such as the suitability of compensation , accounting rules compliance , information asymmetry and other variables that may influence strongly the fraud in the financial statements as well as reducing the negative statement because respondents are less able to respond appropriately.

Keywords: Morality, Motivation, Internal Control Systems, Financial Statement Fraud.

1. PENDAHULUAN

Persaingan dalam dunia pemerintahan yang dilandasi oleh nuansa politik telah mempengaruhi pimpinan pemerintah melakukan kecurangan (*fraud*). Banyak pemicu seseorang untuk melakukan kecurangan yang dapat merugikan orang lain. Kecurangan dapat kita lihat dari penyajian laporan keuangan. Jika laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan fakta dan bersifat material yang diketahui tidak benar dan dilakukan secara sengaja dengan maksud untuk menipu maka dapat dikatakan sebagai kecurangan.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah merupakan pedoman bagi pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan serta menghindari terjadinya perbedaan persepsi dan pemahaman antara pemerintah daerah sebagai penyaji laporan keuangan dengan pengguna laporan keuangan. Karena laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka laporan keuangan pemerintah harus disajikan secara relevan dan reliabel serta perlu pengungkapan yang memadai mengenai informasi-informasi yang dapat mempengaruhi keputusan.

Kecurangan pada dasarnya merupakan upaya yang disengaja untuk menggunakan hak orang lain untuk kepentingan pribadi. Hal ini sesuai dengan pendapat Arens (2008), yang menyatakan bahwa kecurangan adalah setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil harta atau hak orang atau pihak lain. Dalam kaitannya dengan konteks audit atas laporan keuangan, kecurangan didefinisikan sebagai salah saji laporan keuangan yang disengaja.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), ada 3 bentuk kecurangan yang diistilahkan dengan *fraud tree*, yaitu *corruption* (korupsi), *asset misappropriation* (pengambilan aset secara ilegal), dan *fraudulent statements* (pernyataan palsu atau salah pernyataan). Dari tiga bentuk kecurangan tersebut di atas maka pada umumnya kecurangan akuntansi berkaitan dengan korupsi.

Menurut Simanjuntak (2008), dalam teori *GONE* terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan yaitu: *greed* (keserakahan), *opportunity* (kesempatan), *need*

(kebutuhan), *exposure* (pengungkapan). *Greed* dan *need* merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan (disebut juga faktor individual). Sedangkan *opportunity* dan *exposure* berhubungan dengan organisasi sebagai korban pembuatan kecurangan (disebut juga faktor generik/umum). Faktor individual berhubungan dengan perilaku yang melekat pada individu itu sendiri. Dalam kaitannya dengan faktor individu tersebut akan berkaitan dengan moral dan motivasi seseorang untuk melakukan kecurangan. Sedangkan faktor generik akan berhubungan dengan organisasi yang berbuat kecurangan.

Menurut Bertens (1993), moralitas berasal dari kata sifat latin "*moralis*" mempunyai arti yang pada dasarnya sama dengan moral. Moralitas suatu perbuatan/prilaku baik ataupun buruk. Berdasarkan teori *GONE*, faktor pendorong seseorang melakukan kecurangan yang disebabkan oleh moral yaitu *greed* (keserakahan). Menurutny semua orang berpotensi untuk berperilaku serakah karena pada umumnya manusia itu mempunyai sifat yang tidak pernah merasa puas. Jadi kecurangan muncul dan datang karena perilaku buruk dari seseorang tersebut yaitu berupa keserakahan yang ada dalam dirinya.

Menurut Amrizal (2004), dalam suatu organisasi perbuatan curang dapat terjadi karena kurangnya kepedulian positif karyawan terhadap perbuatan salah tersebut bahkan dipandang sudah hal yang biasa atau pura-pura tidak mengetahuinya. Kepedulian positif dari lingkungan kerja sangat diperlukan dalam membangun suatu etika perilaku dan kultur organisasi yang kuat. Rendahnya kepedulian dan rendahnya moral akan menyuburkan tindakan kecurangan yang pada akhirnya akan merusak bahkan dapat menghancurkan organisasi.

Menurut Kartono (2002), motivasi berasal dari kata Latin "*motivius*" artinya sebab, alasan dasar, pikiran dasar, dorongan bagi seseorang untuk berbuat, atau ide pokok yang selalu berpengaruh besar terhadap tingkah laku manusia. Menurut Siagian (2004), sasaran dari teori motivasi adalah pemuas kebutuhan yang bersifat primer. Motivasi untuk berbuat kecurangan berhubungan dengan motivasi negatif. Motivasi negatif adalah perilaku yang berangkat dari pengutamaan kepentingan-kepentingan pribadi, kalau perlu

dengan mengorbankan kepentingan kelompok atau kepentingan organisasi secara keseluruhan. Berdasarkan teori *GONE*, faktor pendorong seseorang melakukan kecurangan yang disebabkan oleh motivasi yaitu *need* (kebutuhan). Setiap orang punya kebutuhan materi yang dapat menjadi pendorong terjadinya kecurangan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut orang akan melakukan apa saja asalkan kebutuhannya terpenuhi walau dengan melakukan kecurangan sekalipun.

Menurut PP No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Tuanakotta (2007), dari bentuk kecurangan pengambilan aset secara ilegal (*asset misappropriation*) dalam bahasa sehari-hari disebut pencurian (*larceny*) yaitu bentuk penjarahan yang dikenal sejak awal peradaban manusia, dimana peluang untuk terjadinya penjarahan jenis ini berkaitan erat dengan lemahnya sistem pengendalian intern, khususnya yang berkenaan dengan perlindungan keselamatan aset (*safeguarding of asset*).

Kasus kecurangan yang ditemui BPK setelah melakukan audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok untuk tahun anggaran (TA) 2009 diantaranya yaitu terdapat uang daerah Pemerintah Kota Solok yang dikelola/disimpan oleh bendahara dan pihak lain yang belum termasuk dalam *bank statement* maupun sisa kas Pemerintah Kota Solok per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 4.565.750.600,00, sehingga diduga menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi untuk memanfaatkan uang APBD di luar mekanisme pertanggungjawaban keuangan daerah (BPK RI). Potensi penyalahgunaan dana APBD di luar mekanisme pertanggungjawaban keuangan daerah oleh pihak tertentu pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai tindakan kecurangan (www.bpk.com).

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok untuk tahun anggaran 2009 ditemukan masalah-masalah material yang mempengaruhi kewajaran laporan keuangan yaitu pengelolaan aset daerah pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Solok belum tertib dan nilai aset tetap yang disajikan di neraca per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 1.588.700.492.253,00 tidak dapat diyakini kewajarannya karena belum dicatat berdasarkan prosedur akuntansi yang dapat dipertanggungjawabkan (www.bpk.com).

Selanjutnya dalam kasus terjadinya *disclaimer* terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok menandakan bahwa Pemerintah Kota Solok harus memberikan perhatian khusus terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2009 dan pimpinan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang terlibat dalam kasus penyimpangan atau penyalahgunaan jabatan harus diberhentikan dari jabatannya. Semua ini bisa terjadi karena administrasi yang belum sesuai dengan peraturan, lemahnya sistem pengendalian internal dan Pemerintah Kota Solok yang tidak memberikan tindak lanjut terhadap tanggapan berbagai pihak. Seharusnya walikota dapat mengoptimalkan fungsi Inspektorat Kota Solok (BAWASDA), sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah dan memperbanyak tenaga-tenaga dengan kualifikasi pendidikan akuntansi untuk menyusun sistem akuntansi keuangan daerah.

Perlunya upaya perbaikan sistem pengendalian internal oleh Pemerintah Kota Solok adalah sesuai dengan berbagai penelitian yang dilakukan oleh berbagai ahli. Menurut Wilopo (2006), kecurangan dapat disebabkan oleh lemahnya pengendalian intern. Jika suatu pengendalian intern lemah maka akan mengakibatkan kekayaan atau aset suatu negara yang dikelola pemerintah daerah tidak terjamin keamanannya, informasi yang ada tidak diteliti dan tidak dapat dipercaya, tidak efisien dan efektifnya kegiatan-kegiatan operasional serta tidak dapat dipatuhinya kebijakan kepala daerah dan perundang-undangan yang ditetapkan.

Hasil penelitian oleh Wilopo (2006), menemukan bahwa pengendalian internal yang

efektif memberikan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di perusahaan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi oleh manajemen perusahaan. Sedangkan kesesuaian kompensasi memberikan pengaruh tidak signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, hal ini menunjukkan bahwa pemberian kompensasi yang sesuai pada perusahaan BUMN di Indonesia tidak secara signifikan menurunkan kecurangan akuntansi dari manajemen perusahaan. Moralitas manajemen memberikan pengaruh yang signifikan negatif pada kecenderungan kecurangan akuntansi pada perusahaan, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi moralitas manajemen pada perusahaan terbuka dan BUMN di Indonesia, semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Aviora (2005), menunjukkan bahwa motivasi negatif berpengaruh secara signifikan positif terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi motivasi negatif seseorang untuk berbuat kecurangan, maka semakin tinggi juga tingkat kecurangan dalam pelaporan keuangan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Wilopo (2006) yang melakukan penelitian tentang "Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi pada Perusahaan Publik dan BUMN di Indonesia". Faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian Wilopo yaitu: keefektifan pengendalian intern, kesesuaian kompensasi, ketaatan pada aturan akuntansi, asimetri informasi, serta moralitas manajemen. Namun penelitian masih sangat perlu dilakukan melihat kasus kecurangan yang masih terjadi di kota Solok. Jika kita lihat sistem pengendalian intern yang seharusnya dapat meminimumkan terjadinya kecurangan tidak terlaksana dengan baik dan banyaknya moralitas yang masih kurang dikalangan pemerintah kota Solok, dimana dari kasus pada pemerintah Solok terjadi penyalahgunaan dana APBN yang tidak sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban.

Selain itu penelitian dilakukan pada Instansi Pemerintah Daerah Kota Solok, sedangkan Wilopo

meneliti di Perusahaan Publik dan BUMN di Indonesia. Perbedaan ini bertujuan untuk melihat apakah moralitas, motivasi dan sistem pengendalian intern aparatur pemerintah berpengaruh terhadap tingkat kecurangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok.

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mengurangi tindakan kecurangan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "**Pengaruh Moralitas, Motivasi dan Sistem Pengendalian Intern Aparatur Pemerintah Terhadap Tingkat Kecurangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok**".

A. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk-bentuk kecurangan dalam laporan keuangan?
2. Apa saja faktor-faktor kecurangan dalam laporan keuangan?
3. Apa saja tindakan yang harus dilakukan untuk mengatasi kecurangan dalam laporan keuangan?
4. Seberapa besar moralitas aparatur pemerintah berpengaruh terhadap kecurangan dalam laporan keuangan?
5. Seberapa besar motivasi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap kecurangan dalam laporan keuangan?
6. Seberapa besar sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kecurangan dalam laporan keuangan?

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini dengan seberapa besar moralitas, motivasi dan sistem pengendalian intern aparatur pemerintah mempengaruhi tingkat kecurangan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Solok.

Berdasarkan latar belakang maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh moralitas aparatur pemerintah terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan?
2. Seberapa besar pengaruh motivasi aparatur pemerintah terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan?
3. Seberapa besar pengaruh sistem pengendalian intern terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan?

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Pengaruh moralitas aparatur pemerintah terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan.
2. Pengaruh motivasi aparatur pemerintah terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan.
3. Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi akademis, penelitian ini untuk mendalami dan memperluas pengetahuan tentang pengaruh moralitas, motivasi dan sistem pengendalian intern aparatur pemerintah terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan pemerintah.
2. Bagi pengguna laporan keuangan pemerintah, penelitian ini untuk menambah dan memberikan gambaran pengetahuan mengenai kecurangan dalam laporan keuangan, sehingga tidak salah dalam melakukan tindakan pengambilan keputusan.
3. Bagi peneliti, dapat mengetahui dan menambah wawasan tentang tingkat kecurangan dalam laporan keuangan yang dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel seperti moralitas, motivasi dan sistem pengendalian intern.
4. Bagi penelitian selanjutnya, dapat dijadikan referensi yang memadai dalam melakukan dan melanjutkan penelitian yang sejenis dan memperluas penelitian ini dengan menambah atau mengkombinasikan variabel-variabel penelitian untuk mencapai hasil yang lebih baik.

2. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Menurut Arens (2008), kecurangan adalah setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil harta atau hak orang atau pihak lain. Dalam kaitannya dengan konteks audit atas laporan keuangan, kecurangan didefinisikan sebagai salah saji laporan keuangan yang disengaja.

Menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2003), tindak kecurangan (*fraud*) dapat didefinisikan sebagai suatu salah saji dari suatu fakta yang bersifat material yang diketahui tidak benar atau dilakukan dengan

sengaja, dengan maksud menipu terhadap pihak lain yang mengakibatkan pihak lain dirugikan.

Menurut Sawyer (2006), kecurangan (*fraud*) adalah melakukan kejahatan dengan penipuan. Banyak istilah dari kecurangan, dapat disebut kecurangan (*fraud*), kejahatan kerah putih (*white color crime*) dan penggelapan (*embezzlement*).

- 1) Kecurangan adalah meliputi serangkaian tindakan-tindakan tidak wajar dan ilegal yang sengaja dilakukan untuk menipu. Tindakan tersebut dapat dilakukan untuk keuntungan ataupun kerugian organisasi dan oleh orang-orang di luar maupun di dalam organisasi.
- 2) Kejahatan kerah putih adalah tindakan yang dilakukan dengan cara nonfisik melalui penyembunyian/penipuan untuk mendapatkan uang/harta benda, untuk menghindari pembayaran, untuk mendapatkan keuntungan bisnis/pribadi.
- 3) Penggelapan adalah konversi secara tidak sah untuk kepentingan pribadi, harta benda yang secara sah berada di bawah pengawasan pelaku kejahatan. Penggelapan tidak meliputi tindakan-tindakan kriminal seperti penyuapan, pencurian, kecurangan terhadap pemerintah, memperoleh harta benda melalui ancaman kekerasan.

Menurut Tuanakotta (2007), dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa pasal yang mencakup pengertian *fraud* seperti Pasal 378 tentang perbuatan curang: (definisi KUHP: “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”).

Menurut Suhermadi (2006), mendefinisikan *fraud* sebagai suatu tindakan kesengajaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dalam bahasa yang lebih sederhana, *fraud* adalah penipuan yang disengaja. Hal ini termasuk berbohong, menipu, menggelapkan dan mencuri. Penggelapan adalah merubah aset/kekayaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya secara tidak wajar adalah untuk kepentingan dirinya. Dengan demikian

perbuatan yang dilakukannya adalah untuk menyembunyikan, menutupi atau dengan cara tidak jujur lainnya melibatkan atau meniadakan suatu perbuatan atau membuat pernyataan yang salah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi di bidang keuangan atau keuntungan lainnya atau meniadakan suatu kewajiban bagi dirinya dan mengabaikan hak orang lain.

a. Jenis-Jenis Kecurangan

Menurut Tuanakotta (2007), *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2004) adalah salah satu asosiasi di Amerika Serikat yang kegiatannya dalam pencegahan dan pemberantasan kecurangan, mengkategorikan kecurangan dalam 3 kelompok sebagai berikut:

1) Korupsi (*corruption*)

Korupsi dalam konteks pembahasan ini adalah korupsi menurut ACFE, bukan pengertian korupsi menurut undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Menurut ACFE korupsi terbagi dalam:

- a) Pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) yaitu pertentangan kepentingan terjadi ketika karyawan, manajer dan eksekutif suatu organisasi atau perusahaan memiliki kepentingan pribadi terhadap transaksi, yang mengakibatkan dampak kurang baik terhadap organisasi atau perusahaan. Pertentangan kepentingan termasuk dalam 3 kategori yaitu rencana penjualan, rencana pembelian, dan rencana lainnya.
- b) Suap (*bribery*) adalah penawaran, pemberian, penerimaan/ permohonan sesuatu dengan tujuan untuk mempengaruhi pembuat keputusan dalam membuat keputusan bisnis.
- c) Pemberian ilegal (*illegal gravity*). Pemberian ilegal hampir sama dengan suap, tetapi pemberian ilegal ini bukan untuk mempengaruhi keputusan bisnis, ini hanya sebuah permainan. Orang yang memiliki pengaruh akan diberi hadiah yang mahal atas pengaruh yang dia berikan dalam negosiasi/kesepakatan bisnis. Hadiah diberikan setelah kesepakatan selesai.
- d) Pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*), pada dasarnya pemerasan secara ekonomi lawan dari suap (*bribery fraud*). Penjual menawarkan untuk memberi suap/hadiah pada pembeli yang memesan produk dari perusahaan.

2) Penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*)

Penyalahgunaan aset/harta perusahaan atau organisasi adalah bentuk kecurangan yang dilakukan dengan cara memiliki secara tidak sah dan penggelapan terhadap aset perusahaan atau organisasi untuk memperkaya diri sendiri dan memakai aset perusahaan untuk kepentingan pribadi.

Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam:

- a) Kecurangan kas (*cash fraud*), yang termasuk kecurangan kas adalah pencurian kas dan pengeluaran-pengeluaran secara curang seperti pemalsuan cek.
- b) Kecurangan atas persediaan dan aset lainnya (*fraud of inventory and all other asset*) adalah kecurangan berupa pencurian dan pemakaian untuk kepentingan pribadi terhadap persediaan atau aset lainnya.
- 3) Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*fraudulent statement*)

Kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material dalam laporan keuangan yang dapat merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat dibagi dalam beberapa kategori:

- a) *Timing difference (improper treatment of sales)*, yaitu bentuk kecurangan laporan keuangan dengan mencatat waktu transaksi yang berbeda/lebih awal dengan waktu transaksi yang sebenarnya, misalnya mencatat transaksi penjualan lebih awal dari transaksi yang sebenarnya.
- b) *Fictitious revenues*, yaitu bentuk kecurangan laporan keuangan dengan menciptakan pendapatan yang sebenarnya tidak pernah terjadi (*fictive*).
- c) *Concealed liabilities and expenses*, yaitu bentuk kecurangan laporan keuangan dengan menyembunyikan kewajiban-kewajiban perusahaan, sehingga laporan keuangan perusahaan terlihat bagus.
- d) *Improper disclosure*, yaitu perusahaan tidak melakukan pengungkapan atas laporan keuangan secara cukup dengan maksud untuk menyembunyikan kecurangan-kecurangan yang terjadi di perusahaan sehingga pembaca laporan keuangan tidak mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi di perusahaan.

e) *Improper asset valuation*, yaitu bentuk kecurangan laporan keuangan dengan melakukan penilaian yang wajar/tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atas aset perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan menurunkan biaya.

b. Faktor-Faktor Kecurangan

Menurut Singleton (2006), terdapat 3 faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan yang dikenal dengan sebutan "*fraud triagle*", sebagai berikut:

1) *Pressure* (tekanan)

Tekanan merupakan faktor pendorong pelaku kecurangan untuk melakukan kecurangan. Misalnya adanya tekanan karena dia memiliki utang atau tekanan untuk dapat memperbaiki posisinya di perusahaan. Karyawan perusahaan yang diharapkan dengan hilangnya penjualan, kompetisi yang kuat, *schedule* atau spesifikasi yang berat, peraturan-peraturan yang keras atau laba yang menurun, mungkin melakukan hal-hal yang ilegal atau tidak etis untuk membalik posisi mereka atau perusahaan.

2) *Opportunity* (kesempatan)

Kecurangan dapat terjadi jika ada kesempatan untuk melakukan kecurangan perusahaan. Perusahaan yang tidak memiliki pengendalian intern yang efektif, kesempatan untuk melakukan kecurangan terbuka lebar. Tetapi dengan pengendalian intern yang memadai akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan atau godaan para pelaku kecurangan untuk melakukan kecurangan. Misalnya, jika aset dibiarkan tanpa pengawas, karyawan dapat beralasan bahwa kondisi memang memungkinkan untuk melakukan kecurangan terhadap aset.

3) *Rationalization*

Para pelaku kecurangan menganggap bahwa kecurangan yang mereka lakukan adalah sesuatu yang wajar sehingga mereka melakukan kecurangan dan mereka beranggapan bahwa mereka hanya mengambil sedikit atau meminjam harta perusahaan dan tidak akan merugikan perusahaan.

Menurut Tuanakotta (2007), ada ungkapan yang secara mudah menjelaskan penyebab atau akar permasalahan dari *fraud*. Ungkapan itu

adalah: *fraud by need, by greed, and by opportunity*. Namun ada makna dari ungkapan itu. Kalau ingin mencengah *fraud*, hilangkan atau tekan sedapat mungkin penyebab. Menghilangkan atau menekan *need* dan *greed* yang mengawali terjadinya *fraud* dilakukan sejak menerima seseorang (*recruitment process*). Sedangkan unsur *by opportunity* dalam ungkapan tersebut biasanya ditekan melalui pengendalian intern.

Menurut survei oleh KPMG pada tahun 1998 tentang kecurangan, faktor penyebab atau indikator kecurangan yang dilakukan oleh pimpinan maupun bawahan dapat disebabkan karena:

- 1) Tekanan dalam diri seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 2) Adanya penyalahgunaan jabatan
- 3) Kebiasaan berjudi
- 4) Membayangkan hidup mewah
- 5) Kejadiannya selalu berulang-ulang
- 6) Stres yang berlebihan karena tuntutan hidup
- 7) Tekanan dalam memenuhi batas waktu anggaran
- 8) Hari berlibur yang pendek
- 9) Jam kerja yang tidak biasa

Faktor-faktor di atas tidak terlepas dari moral dan motivasi dari seseorang sehingga dia melakukan kecurangan. Moralitas yaitu suatu perbuatan/prilaku baik ataupun buruk. Dari 9 faktor penyebab kecurangan yang disurvei oleh KPMG yang menjadi penyebab kecurangan yang terkait dengan moral seseorang yaitu menyalahgunakan jabatan, kebiasaan berjudi.

Sedangkan motivasi artinya sebab, alasan dasar, pikiran dasar, dorongan bagi seseorang untuk berbuat, atau ide pokok yang selalu berpengaruh besar terhadap tingkah laku manusia. Dari 9 faktor penyebab kecurangan yang disurvei oleh KPMG yang menjadi penyebab kecurangan yang terkait dengan motivasi yaitu adanya tekanan dalam diri seseorang untuk memenuhi keuangannya dan selalu membayangkan hidup mewah.

Selain dari faktor-faktor di atas, Tuanakotta (2007), dari bentuk kecurangan "pengambilan" aset secara ilegal (*asset misappropriation*) dalam bahasa sehari-hari disebut pencurian (*larceny*) yaitu bentuk penjarahan yang paling kuno dan dikenal sejak awal peradaban manusia, dimana peluang untuk terjadinya penjarahan jenis ini

berkaitan erat dengan lemahnya sistem pengendalian intern, khususnya yang berkenaan dengan perlindungan keselamatan aset (*safeguarding of assets*).

c. Kecurangan dalam Laporan Keuangan

Menurut Undang-Undang (UU) No 24 tahun 2006, dijelaskan bahwa kecurangan akuntansi sebagai salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan, salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aset (seringkali disebut penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aset entitas yang berkaitan laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Menurut William (1996), kecurangan pelaporan keuangan (*fraudulent financial reporting*) terdiri dari tindakan-tindakan seperti:

- 1) Manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukung yang menjadi sumber penyusunan laporan keuangan.
- 2) Representasi yang salah atau penghapusan yang disengaja atas peristiwa-peristiwa, transaksi-transaksi, atau informasi signifikan lainnya yang ada dalam laporan keuangan.
- 3) Salah penerapan yang disengaja atas prinsip-prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa kecurangan dalam laporan keuangan terdiri dari tindakan manipulasi, pemalsuan catatan akuntansi, penghapusan secara sengaja terhadap informasi yang ada dalam laporan keuangan, dan terdapatnya salah penerapan secara sengaja terhadap prinsip-prinsip akuntansi.

Menurut Taylor (1997), memberikan definisi dari kecurangan pelaporan keuangan yaitu kegiatan yang disengaja atau nekat, apakah berupa kegiatan atau penghapusan yang menghasilkan kesalahan pernyataan keuangan sehingga terlihat lebih baik dari yang sebenarnya. Menurut Schilit (1993), mengidentifikasi tujuh kategori besar istilah lain kecurangan pelaporan keuangan antara lain merekam penghasilan sebelum didapatkan, membuat pendapatan fiktif, membesar-besarkan

keuntungan dengan transaksi yang tidak terjadi, mengganti pengeluaran saat ini dengan periode sebelumnya, tidak merekam atau menyingkap kebenaran, mengganti pendapatan terbaru dengan periode sebelumnya, mengganti pengeluaran masa yang akan datang dengan periode sebelumnya.

2. Moralitas

Menurut Bertens (1993), moralitas (dari kata sifat latin *moralis*) mempunyai arti yang pada dasarnya sama dengan “moral”. Kita berbicara tentang “moralitas suatu perbuatan”, artinya segi moral suatu perbuatan baik atau buruk. Moralitas adalah sifat moral/keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk.

Menurut Salam (2002), moral berasal dari kata latin *mores*. *Mores* berasal dari kata *mos* yang berarti kesusilaan, tabiat, atau kelakuan. Berarti moral dapat diartikan sebagai ajaran kesusilaan, yang memuat ajaran tentang baik buruknya perbuatan. Jadi, perbuatan itu dinilai sebagai perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Penilaian itu menyangkut perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.

Menurut Budiningsih (2004), moralitas terjadi apabila orang mengambil yang baik karena ia sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya dan bukan karena ia mencari keuntungan. Jadi moralitas adalah sikap dan perbuatan baik yang betul-betul tanpa pamrih.

Menurut Amrizal (2004), peranan moral/kepribadian yang baik dari seorang pimpinan dan komitmennya yang kuat sangat mendorong tegaknya suatu etika perilaku dalam suatu organisasi dan dapat dijadikan dasar bertindak dan suri tauladan bagi seluruh pegawai. Pimpinan tidak bisa menginginkan suatu etika dan perilaku yang tinggi dari suatu organisasi sementara pimpinan itu sendiri tidak sungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Dalam suatu organisasi, terutama unit organisasi yang besar dari manajemen sangat dibutuhkan dua hal yaitu komitmen moral dan keterbukaan dalam komunikasi.

Menurut Amrizal (2004), dalam suatu organisasi perbuatan curang dapat terjadi karena kurangnya kepedulian positif karyawan terhadap perbuatan salah tersebut bahkan dipandang sudah hal yang biasa atau pura-pura tidak mengetahuinya. Kepedulian positif dari lingkungan kerja sangat diperlukan dalam membangun suatu etika perilaku

dan kultur organisasi yang kuat. Rendahnya kepedulian dan rendahnya moral akan menyuburkan tindakan kecurangan yang pada akhirnya akan merusak bahkan dapat menghancurkan organisasi.

Menurut Cressey dalam Tuanakotta (2007), untuk meneliti para pegawai yang mencuri uang perusahaan (*embezzlers*) yang merupakan perbuatan kecurangan, ia mewawancarai 200 orang yang dipenjarakan karena *fraud*. Cressey menemukan bahwa adanya *violation of ascribed obligation*, artinya melanggar suatu pedoman kerja atau lebih dikenal juga dengan penyalahgunaan jabatan merupakan salah satu perbuatan kecurangan yang disebabkan oleh moral seseorang.

Sedangkan menurut Simanjuntak (2008), dalam *GONE theory* menyebutkan bahwa kecurangan disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu :

1) *Greed* (keserakahan)

Keserakahan berhubungan dengan moral seseorang. Menurutnya semua orang berpotensi untuk berperilaku serakah karena pada umumnya manusia itu mempunyai sifat yang tidak pernah merasa puas. Jadi kecurangan muncul karena keserakahan dalam diri seseorang.

2) Berperilaku etis

Menurut survey KPMG dalam Koletar (2003), faktor yang mempengaruhi tingkat kecurangan adalah menyalahgunakan jabatan dan adanya kebiasaan berjudi yang berkaitan dengan buruknya moral seseorang.

3. Motivasi

Istilah motivasi (*motivation*) berasal dari perkataan bahasa latin, yakni *movere*, yang berarti “menggerakkan” (*to move*). Ada berbagai rumusan untuk istilah motivasi, seperti diungkapkan Mitchell dalam Winardi (2001),

“...motivasi mewakili proses psikologikal, yang menyebabkan timbulnya, diarahkannya, dan terjadinya persistensi kegiatan-kegiatan sukarela (*volunter*) yang diarahkan kearah tujuan tertentu”.

Chung dalam Gomes (2003), menyatakan bahwa “*motivation is defined as goal-directed behavior. It concern the level of effort one exerts in pursuing a goal*”. Motivasi dirumuskan sebagai perilaku yang ditujukan pada sasaran. Motivasi berkaitan dengan tingkat usaha yang dilakukan

untuk mengejar suatu tujuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998) mendefinisikan motivasi sebagai:

“motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang, sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, atau motivasi adalah usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu bergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaknya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya”.

Menurut Kartono (2002), motivasi (dari kata latin, *motivius*) artinya sebab, alasan dasar, pikiran dasar, dorongan bagi seseorang untuk berbuat, atau ide pokok yang selalu berpengaruh besar terhadap tingkah laku manusia. Winardi (2001), mendefinisikan motivasi seseorang itu bersumber dari dalam maupun dari luar diri seseorang. Motivasi dari dalam diri (intrinsik) yaitu keinginan bertindak yang disebabkan oleh faktor pendorong yang murni berasal dari dalam diri individu. Motivasi dari luar (ekstrinsik) yaitu keinginan untuk bertingkah laku sebagai akibat adanya rangsangan dari luar.

Menurut Siagian (2004), salah satu sasaran teori motivasi adalah pemuas kebutuhan manusia termasuk kebutuhan yang bersifat primer. Dilihat dari kaca mata manajemen, motivasi para anggota organisasi dapat dikategorikan menjadi dua jenis yaitu motivasi positif dan motivasi negatif.

Motivasi positif adalah perilaku yang mendorong tercapainya tujuan dan berbagai sasaran organisasi dengan tingkat efisiensi, efektivitas dan produktifitas yang tinggi. Motivasi negatif adalah perilaku yang berangkat dari pengutamaan kepentingan-kepentingan pribadi, kalau perlu dengan mengorbankan kepentingan kelompok atau kepentingan organisasi secara keseluruhan. Persepsi yang mengutamakan kepentingan pribadi mempunyai dampak negatif yang lebih kuat lagi apabila para anggota organisasi tidak memiliki tingkat keterampilan yang sesuai dengan tuntutan tugas masing-masing. Dengan kata lain, pada dasarnya motivasi negatif timbul karena dua hal. Pertama, karena sikap dan tindak tanduk yang diarahkan kepada kepentingan diri sendiri. Kedua, karena faktor-faktor ketidakmampuan menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepada seseorang.

Menurut Tuanakotta (2007), salah satu pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan adalah karena *pressure* (tekanan). Tekanan merupakan faktor pendorong pelaku kecurangan untuk melakukan kecurangan. Misalnya adanya tekanan karena dia memiliki utang/tekanan untuk dapat memperbaiki posisinya dalam organisasi tempat mereka bekerja.

Menurut Simanjuntak (2008), dalam teori *GONE*, faktor pendorong seseorang melakukan kecurangan yang disebabkan oleh motivasi yang negatif yaitu:

1. *Need* (kebutuhan)

Setiap orang punya kebutuhan materi yang dapat menjadi pendorong terjadinya kecurangan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut orang akan melakukan apa saja asalkan kebutuhannya terpenuhi walau dengan melakukan kecurangan sekalipun.

2. *Pressure* (tekanan)

Tekanan merupakan faktor pendorong pelaku kecurangan untuk melakukan kecurangan. Misalnya adanya tekanan karena dia memiliki utang atau tekanan untuk dapat memperbaiki posisinya di perusahaan. Karyawan perusahaan yang diharapkan dengan hilangnya penjualan, kompetisi yang kuat, *schedule* atau spesifikasi yang berat, peraturan-peraturan yang keras atau laba yang menurun, mungkin melakukan hal-hal yang ilegal atau tidak etis untuk membalik posisi mereka atau perusahaan.

4. **Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

Dalam PP No. 60 tahun 2008, sistem pengendalian intern pemerintah adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern pemerintah terdiri dari lima elemen, yaitu:

1) Lingkungan pengendalian

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat melalui:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika.
- b. Komitmen terhadap kompetensi.

- c. Kepemimpinan yang kondusif.
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.
- h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

2) Penilaian risiko

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, yang terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko. Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.

3) Kegiatan pengendalian

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.

4) Informasi dan komunikasi

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.

5) Pemantauan pengendalian intern

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern dilakukan pengawasan intern dan pembinaan

penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).

Menurut Bastian (2003), pengendalian intern merupakan suatu proses yang dijalankan oleh eksekutif (kepala daerah, instansi/dinas dan segenap personil) yang mendesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga tujuan sebagai berikut:

- a. Keandalan laporan keuangan
- b. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
- c. Efektivitas dan efisiensi operasi

Amrizal (2004), menyatakan bahwa salah satu cara untuk mencegah timbulnya kecurangan adalah dengan merancang sebuah sistem yang dilengkapi dengan *intern control* yang cukup memadai sehingga kecurangan sukar dilakukan oleh pihak luar maupun orang dalam perusahaan. Dengan demikian perusahaan akan terhindar dari kecurangan, sehingga laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan tentunya akan lebih akurat dan lebih menggambarkan kondisi keuangan yang sebenarnya, sehingga tidak menyesatkan para penggunanya dalam pengambilan keputusan.

Salah satu cara untuk mengontrol kecurangan maupun kerugian dalam bisnis, adalah dengan membangun suatu sistem pengendalian intern. Tujuan dari pengendalian intern tersebut adalah sebagai pertahanan pertama untuk melawan kecurangan dalam organisasi. Hal ini perlu diterapkan untuk memonitor sistem kendali untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. Pengendalian intern memahami berbagai jenis kecurangan yang akan dilakukan oleh organisasi, dan juga untuk mendeteksi terjadinya korupsi.

Menurut Amrizal (2004), cara yang digunakan manajemen dalam mengefektifkan aktivitas pengendalian intern adalah:

1) Mereview kinerja

Aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, prakiraan, atau kinerja periode sebelumnya, menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda operasi atau keuangan satu sama lain, bersama dengan analisis atau hubungan dan tindakan penyelidikan dan perbaikan keuangan.

2) Pengolahan informasi

Berbagai pengendalian dilaksanakan untuk mengecek ketepatan, kelengkapan, otorisasi transaksi. Dua pengelompokan luas aktivitas pengendalian sistem informasi adalah pengendalian umum (*general control*) dan pengendalian aplikasi (*application control*). Pengendalian umum biasanya mencakup pengendalian atas operasi pusat data, pemrosesan dan pemeliharaan perangkat lunak sistem, keamanan akses, pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Pengendalian ini berlaku untuk *mainframe*, *minicomputer* dan lingkungan pemakai akhir. Pengendalian ini membantu menetapkan bahwa transaksi adalah sah, diotorisasi semestinya, dan diolah secara lengkap dan akurat.

3) Pengendalian fisik

Aktivitas pengendalian fisik mencakup keamanan fisik aset, penjagaan yang memadai terhadap fasilitas yang terlindungi dari akses terhadap aset dan catatan, otorisasi untuk akses ke program komputer dan data *file*, dan perhitungan secara periodik dan perbandingan dengan jumlah yang tercantum dalam catatan pengendali.

4) Pemisahan tugas

Pembebanan tanggung jawab ke orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi, pencatatan transaksi, menyelenggarakan penyimpanan aset ditujukan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi baik untuk berbuat kecurangan dan sekaligus menyembunyikan kekeliruan dan ketidakberesan dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan normal.

Menurut Wilopo (2006), jika suatu sistem pengendalian intern lemah maka akan mengakibatkan kekayaan perusahaan tidak terjamin keamanannya, informasi akuntansi yang ada tidak teliti dan tidak dapat dipercaya, tidak efisien dan efektifnya kegiatan-kegiatan operasional perusahaan serta tidak dapat dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang ditetapkan. Dengan adanya pengendalian wewenang oleh pemilik kepada pengelola, maka fungsi pengendalian semakin bertambah penting. Hal ini untuk menentukan apakah tugas dan wewenang yang didelegasikan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Proses pengendalian intern tersebut dilakukan oleh pihak

manajemen yang bertanggung jawab untuk melindungi dan mengamankan harta perusahaan.

Menurut Tuanakotta (2007), dari bentuk kecurangan pengambilan aset secara ilegal (*asset misappropriation*) dalam bahasa sehari-hari disebut pencurian (*larceny*), yaitu bentuk penjarahan yang dikenal sejak awal peradaban manusia, dimana peluang untuk terjadinya penjarahan jenis ini berkaitan erat dengan lemahnya sistem pengendalian intern, khususnya yang berkenaan dengan perlindungan keselamatan aset (*safeguarding of assets*).

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain penelitian Wilopo (2006), mengenai Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal yang efektif memberikan pengaruh yang signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di perusahaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa semakin efektif pengendalian internal di perusahaan, semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi oleh manajemen perusahaan. Sedangkan moralitas manajemen memberikan pengaruh yang signifikan negatif pada kecenderungan kecurangan akuntansi. Artinya semakin tinggi moralitas manajemen semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi atau semakin tinggi tahapan moralitas manajemen semakin manajemen memperhatikan kepentingan yang lebih luas dan universal dari pada kepentingan perusahaan semata, terlebih kepentingan pribadi.

Wiliya (2010) juga meneliti mengenai pengaruh moralitas, motivasi dan sistem pengendalian intern terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kota Padang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa moralitas aparatur pemerintah berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kota Padang, motivasi negatif dari aparatur pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kota Padang, dan sistem pengendalian intern aparatur pemerintah berpengaruh signifikan

negatif terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kota Padang.

Lebih lanjut, hasil penelitian Aviora (2005), yang meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur di Sumatera Barat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keefektifan pengendalian intern berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin efektif pengendalian intern pada perusahaan maka akan mengurangi kecurangan pelaporan keuangan. Karena dengan efektifnya pengendalian intern dapat mendorong pihak manajemen perusahaan untuk tidak melakukan kecurangan pada pelaporan keuangan. Sedangkan motivasi berpengaruh secara signifikan positif terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi motivasi negatif seseorang untuk berbuat kecurangan, maka semakin tinggi juga tingkat kecurangan pelaporan keuangan.

Selanjutnya moralitas manajemen berpengaruh secara signifikan negatif terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Hal ini berarti bahwa moralitas manajemen berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan yang terjadi di perusahaan. Moralitas yang tinggi yang dimiliki oleh seorang manajer mampu untuk menghindari manajer melakukan kecurangan pelaporan keuangan, karena seorang manajer bertindak untuk lebih mementingkan kepentingan perusahaan dibandingkan dengan kepentingan sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa moralitas berpengaruh secara signifikan negatif terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan, dan motivasi berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kecurangan dalam pelaporan keuangan, sedangkan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan.

B. Hubungan Antar Variabel Penelitian

1. Moralitas terhadap Tingkat Kecurangan dalam Laporan Keuangan

Menurut Bertens (1993), moralitas berasal dari kata sifat latin “moralis” mempunyai arti yang pada dasarnya sama dengan “moral”. Moralitas yaitu suatu perbuatan/prilaku baik ataupun buruk. Berdasarkan penelitian Wilopo (2006), moralitas

manajemen memberikan pengaruh yang signifikan negatif pada kecenderungan kecurangan akuntansi. Artinya semakin tinggi moralitas manajemen semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi atau semakin tinggi tahapan moralitas manajemen semakin manajemen memperhatikan kepentingan yang lebih luas dan universal daripada kepentingan perusahaan semata, terlebih kepentingan pribadi.

Selain itu, menurut Koletar (2003), penyalahgunaan jabatan merupakan perilaku/moral yang tidak sesuai dengan pedoman atau ketentuan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dan adanya kebiasaan berjudi merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kecurangan seseorang, dimana faktor ini secara langsung berkaitan dengan moral (perbuatan).

2. Motivasi terhadap Tingkat Kecurangan dalam Laporan Keuangan

Menurut Kartono (2002), motivasi (dari kata latin, *motivius*) artinya sebab, alasan dasar, pikiran dasar, dorongan bagi seseorang untuk berbuat, atau ide pokok yang selalu berpengaruh besar terhadap tingkah laku manusia. Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998), mendefinisikan motivasi sebagai dorongan yang timbul pada diri seseorang, sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, atau motivasi adalah usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu bergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.

Berdasarkan penelitian Aviora (2005), menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh secara signifikan positif terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi motivasi negatif seseorang untuk berbuat kecurangan, maka semakin tinggi juga tingkat kecurangan dalam pelaporan keuangan.

Menurut Siagian (2004), salah satu sasaran teori motivasi adalah pemuas kebutuhan manusia termasuk kebutuhan yang bersifat primer. Menurut Simanjuntak (2008), dalam teori *GONE*, motivasi/dorongan seseorang melakukan kecurangan yang disebabkan oleh adanya *need* (kebutuhan). Setiap orang punya kebutuhan materi yang dapat menjadi pendorong terjadinya kecurangan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut

orang akan melakukan apa saja asalkan kebutuhannya terpenuhi walau dengan melakukan kecurangan sekalipun. Karena adanya kebutuhan dari diri seseorang tersebut maka akan memotivasi atau mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhannya dengan melakukan kecurangan.

Menurut Tuanakotta (2007), salah satu pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan adalah karena *pressure* (tekanan). Tekanan merupakan faktor pendorong pelaku kecurangan untuk melakukan kecurangan. Misalnya adanya tekanan karena dia memiliki utang/tekanan untuk dapat memperbaiki posisinya dalam organisasi tempat mereka bekerja. Sedangkan menurut Koletar (2003), menyebutkan bahwa faktor penyebab kecurangan yang disurvei oleh KPMG yang menjadi penyebab kecurangan yang terkait dengan motivasi yaitu adanya tekanan dalam diri seseorang untuk memenuhi keuangannya dan selalu membayangkan hidup mewah.

3. Sistem Pengendalian Intern terhadap Tingkat Kecurangan dalam Laporan Keuangan

Sistem pengendalian intern menurut Bastian (2003), merupakan suatu proses yang dijalankan oleh eksekutif (kepala daerah, instansi/dinas dan segenap personil) yang mendesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga tujuan sebagai berikut:

- 1) Keandalan laporan keuangan
- 2) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
- 3) Efektivitas dan efisiensi operasi

Berdasarkan penelitian Wilopo (2006), mengenai analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi: studi pada perusahaan publik dan badan usaha milik negara di Indonesia, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengendalian intern yang efektif memberikan pengaruh yang signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di perusahaan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa semakin efektif pengendalian intern di perusahaan, semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi.

Menurut Tuanakotta (2007), dari bentuk kecurangan pengambilan aset secara ilegal (*asset misappropriation*) dalam bahasa sehari-hari disebut pencurian (*larceny*), yaitu bentuk penjarahan yang

dikenal sejak awal peradaban manusia, dimana peluang untuk terjadinya penjarahan jenis ini berkaitan erat dengan lemahnya sistem pengendalian intern, khususnya yang berkenaan dengan perlindungan keselamatan aset (*safeguarding of assets*). Menurut Koletar (2003), menyebutkan bahwa faktor penyebab kecurangan yang disurvei oleh KPMG kejadiannya selalu berulang-ulang.

Menurut Simanjuntak (2008), dalam teori *GONE* faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan dalam suatu organisasi yaitu adanya *opportunity* (kesempatan). Kecurangan umumnya didorong oleh adanya kesempatan. Kesempatan tersebut muncul karena lemahnya pengawasan, seperti tidak adanya otorisasi untuk setiap transaksi dalam pembelian, sehingga bagian pembelian bisa saja melakukan kecurangan dengan menggelapkan jumlah pembelian, atau melakukan pembelian yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Serta karena tidak adanya tindakan atau konsekuensi kepada pelaku kecurangan terutama dalam hal pengungkapan kecurangan yang telah terjadi, maka hal ini akan semakin mendorong seseorang untuk bisa melakukan kecurangan yang sama.

D. Kerangka Konseptual

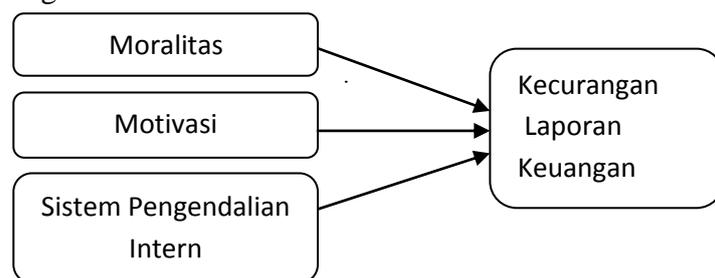
Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan dan mengungkapkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan latar belakang dari kajian teori yang telah dikemukakan di atas. Dapat dijelaskan bahwa terdapat pengaruh moralitas, motivasi dan sistem pengendalian intern aparatur pemerintah terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan pemerintah Kota Solok.

Moralitas dari aparatur pemerintah berpengaruh terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan. Dengan menyalahgunakan jabatan yang telah diberikan (tidak berperilaku sesuai dengan pedomannya) dan keserakahan (*greed*) merupakan faktor pemicu kecurangan (*fraud*).

Motivasi dari aparatur pemerintah berpengaruh terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan. Seseorang melakukan kecurangan ditimbulkan karena adanya tekanan (*pressure*) dalam diri seseorang (memiliki utang) dan adanya kebutuhan (*need*).

Lemahnya sistem pengendalian intern dalam suatu organisasi dapat mempengaruhi kecurangan dalam laporan keuangan. Jika suatu sistem pengendalian intern lemah maka akan mengakibatkan kekayaan perusahaan tidak terjamin keamanannya, informasi akuntansi yang ada tidak diteliti dan tidak dapat dipercaya, tidak efisien dan efektifnya kegiatan-kegiatan operasional perusahaan serta tidak dapat dipenuhinya kebijaksanaan pimpinan yang ditetapkan. Dengan adanya pengendalian wewenang oleh pimpinan kepada pegawainya, maka fungsi pengendalian semakin bertambah penting. Hal ini untuk menentukan apakah tugas dan wewenang yang didelegasikan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Bertitik tolak pada kajian di atas, maka untuk lebih jelasnya variabel-variabel yang menjadi objek pengujian ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Konseptual

E. Hipotesis

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas dan didukung dengan kajian teori, maka dapat dilakukan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Moralitas aparatur pemerintah berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan dalam laporan keuangan.

H2 : Motivasi aparatur pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan.

H3 : Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan dalam laporan keuangan.

3. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dan kausatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan peristiwa-peristiwa atau kejadian

variabel-variabel yang diteliti, dan juga untuk menemukan ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, dimana data yang digunakan dalam bentuk angka. Menurut Indriantoro (1999), penelitian kausatif adalah tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh moralitas, motivasi dan sistem pengendalian intern aparatur pemerintah mempengaruhi tingkat kecurangan dalam laporan keuangan.

B. Populasi dan Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi, populasi menurut Sugiyono (2008) adalah kumpulan dari seluruh elemen yang sejenis yang dapat dibedakan satu sama lainnya, disebabkan karena adanya nilai karakteristik yang berlainan. Populasi dalam penelitian ini adalah Instansi Pemerintah Kota Solok. Jumlah populasi adalah 24 Instansi Pemerintah Kota Solok. Peneliti menjadikan seluruh populasi sebagai sampel (*total sampling*) karena jumlah populasi kurang dari 100 subjek. Respondennya adalah kepala SKPD dan kepala bagian keuangan SKPD di Kota Solok sehingga terdapat 48 responden. Dimana terdiri dari 22 responden dari dinas, 16 responden dari kantor, 8 responden dari badan dan 2 responden dari inspektorat daerah.

C. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data subjek. Data subjek adalah jenis data penelitian berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik sekelompok atau seseorang yang menjadi subjek penelitian (responden).

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer. Menurut Kuncoro (2003), data primer adalah data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Dalam penelitian ini data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada kepala SKPD dan kepala bagian keuangan SKPD Kota Solok.

D. Metode Pengumpulan Data

Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada kepala SKPD dan kepala bagian keuangan di SKPD Kota Solok. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan

data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya. Kuesioner disebarkan secara langsung pada responden. Responden diharapkan mengembalikan kuesioner ini kepada peneliti dalam waktu yang ditentukan dan dijemput langsung ke kantor SKPD yang ada di Kota Solok sesuai dengan kesepakatan pengembalian.

E. Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen

Menurut Kuncoro (2003), variabel dependen (terikat) adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan. Pengamatan akan dapat mendeteksi ataupun menerangkan variabel dalam variabel terikat beserta perubahannya yang terjadi kemudian. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kecurangan dalam laporan keuangan.

2. Variabel Independen

Variabel independen (bebas) adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen yang mempunyai pengaruh positif ataupun negatif bagi variabel independen lainnya. Variabel independen dalam penelitian ini adalah moralitas, motivasi dan sistem pengendalian intern aparatur pemerintah.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket. Angket digunakan untuk memperoleh data mengenai pengaruh moralitas, motivasi dan sistem pengendalian intern aparatur pemerintah terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan pemerintah Kota Solok. Dimana angket dari moralitas, sistem pengendalian intern dan kecurangan diadopsi dari penelitian sebelumnya yaitu oleh Wilopo (2006). Penelitian Wilopo di BUMN sedangkan penelitian ini di instansi pemerintah. Motivasi dibuat sendiri berdasarkan teori yang ada dalam Simanjuntak (2008), Tuankotta (2007) dan Koletar (2003).

Penyusunan instrumen penelitian pada variabel motivasi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Pembuatan kisi-kisi berdasarkan indikator masing-masing variabel, (2) Penyusunan butir-butir pernyataan sesuai dengan indikator masing-masing variabel, (3) melakukan analisis rasional untuk melihat kesesuaian butir-butir angket dengan indikator serta kesepakatan menyusun butir-butir kuesioner dari segi aspek

yang diukur, dan (4) Mengkonsultasikan dengan pembimbing untuk memperoleh kesesuaian butir dengan indikator.

Untuk mengukur variabel motivasi, sistem pengendalian intern dan kecenderungan kecurangan laporan keuangan aparatur pemerintah Kota Solok digunakan angket yang disusun berdasarkan model skala likert. Alternatif jawaban disusun berdasarkan lima kategori untuk pertanyaan positif dan negatif, yaitu: Selalu (SL), Sering (SR), Kadang-kadang (KK), Jarang (JR), dan Tidak Pernah (TP). Sedangkan untuk mengukur variabel moralitas aparatur pemerintah Kota Solok digunakan angket yang disusun berdasarkan model skala likert. Alternatif jawaban disusun berdasarkan lima kategori untuk pertanyaan positif dan negatif, yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-Ragu (RR), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS).

G. Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2007). Sebelum kuesioner dibagikan maka dilakukan uji pendahuluan. Untuk uji validitas maka digunakan rumus *product moment* sebagai berikut (Arikunto, 2002):

$$r_{xy} = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n \sum x^2 - (\sum x)^2\} \{n \sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Keterangan :

- r_{xy} = Koefisien korelasi
- n = Besar sampel
- x = variabel bebas (X_1, X_2, X_3)
- y = Tingkat kecurangan laporan

keuangan

Dari *print out* SPSS versi 15.00 dapat dilihat dari *corrected item-total correlation*. Jika nilai $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka nomor item tersebut tidak valid, sebaliknya jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka item tersebut dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. bagi item yang tidak valid, maka item yang memiliki nilai r_{hitung} yang paling kecil dikeluarkan dan dilakukan analisis yang sama sampai semua item dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Setelah dilakukan pengujian validitas, selanjutnya akan dilakukan pengujian reliabilitas, yang tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, jika dilakukan pengukuran dua kali atau lebih. Instrumen dikatakan reliabel (andal) jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk uji reliabilitas digunakan rumus *cronbach's alpha* menurut Sekaran (2006), sebagai berikut:

$$\alpha = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[\frac{(1 - \sum \vartheta t^2)}{\vartheta t^2} \right]$$

Keterangan:

α = *cronbach's coefficient alpha*

k = jumlah pecahan

$\sum \vartheta t^2$ = total varian masing-masing pecahan

ϑt^2 = varian dari total skor

Cara untuk mengukur reliabilitas dengan *cronbach's alpha* dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) $> 0,6$ = tidak reliabel
- 2) $0,6 - 0,7$ = dapat diterima
- 3) $0,7 - 0,8$ = baik
- 4) $> 0,8$ = reliabel

H. Hasil Uji Coba Instrumen

Hasil pengujian ini bertujuan untuk melihat seberapa kuat butir-butir variabel yang ada pada penelitian ini. Uji coba instrumen dilakukan pada mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP dengan syarat telah mengambil mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1, pemeriksaan akuntansi 2, dan akuntansi sektor publik dengan jumlah responden sebanyak 30 orang. Berikut adalah lampiran hasil dari uji coba intrumennya:

a. Variabel Moralitas

Walaupun semua item dinyatakan valid pada *pilot test*, data penelitian juga diperlukan uji validitas instrument. Untuk melihat validitas data, dilihat dari *Corrected Item-Total Correlation*, apabila nilainya melebihi dari nilai r table maka data tersebut dikatakan valid. Untuk $n = 30$ didapat r table = 0,3601. Nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil untuk data yang diolah pada variabel independensi untuk $n = 30$ adalah 0,626 sehingga semua item dinyatakan valid.

b. Variabel Motivasi

Walaupun semua item dinyatakan valid pada *pilot test*, data penelitian juga diperlukan uji validitas instrument. Untuk melihat validitas data, dilihat dari *Corrected Item-Total Correlation*,

apabila nilainya melebihi dari nilai r table maka data tersebut dikatakan valid. Untuk $n = 30$ didapat r table = 0,3601. Nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil untuk data yang diolah pada variabel independensi untuk $n = 30$ adalah 0,637 sehingga semua item dinyatakan valid.

c. Variabel Sistem Pengendalian Intern

Hasil uji validitas data penelitian untuk variabel sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut:

Walaupun semua item dinyatakan valid pada *pilot test*, data penelitian juga diperlukan uji validitas instrument. Untuk melihat validitas data, dilihat dari *Corrected Item-Total Correlation*, apabila nilainya melebihi dari nilai r table maka data tersebut dikatakan valid. Untuk $n = 30$ didapat r table = 0,3601. Nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil untuk data yang diolah pada variabel independensi untuk $n = 30$ adalah 0,367 sehingga semua item dinyatakan valid.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Jumlah populasi penelitian ini adalah 24 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari Dinas, Bagian, Kantor, Badan, Sekretariat dan Inspektorat Daerah. Setiap sampel masing-masing terdiri dari dua responden yaitu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kepala bagian keuangan SKPD, sehingga menjadi 48 responden.

Dari kuesioner yang dibagikan, ada 2 SKPD yang menolak diberikan kuesioner, sehingga kuesioner yang tersebar sebanyak 22 SKPD atau 44 responden. SKPD yang menolak diberikan kuesioner yaitu: 1) Dinas Pendidikan. 2) Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. Dinas Pendidikan menolak diberikan kuesioner karena responden di instansi ini sedang melakukan kunjungan keluar daerah. Sedangkan Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata menolak diberikan kuesioner alasannya karena kesibukan. Jumlah responden yang mengembalikan kuesioner adalah 44 responden dan semuanya mengisi dengan lengkap. Kuesioner diantarkan langsung kepada masing-masing responden. Rentang waktu penyebaran dan pengumpulan kuesioner adalah 16 Juli 2012 s/d 2 Agustus 2012.

B. Demografi Responden

Dari hasil penelitian dapat diketahui karakteristik responden kepala SKPD dan kepala bagian keuangan yang bekerja pada Instansi Pemerintah Kota Solok yang dijadikan sampel penelitian ini. Berdasarkan data yang diisi oleh responden pada kuesioner penelitian, diketahui karakteristik responden sajikan secara umum menuruti jenis kelamin, latar belakang pendidikan, dan lama bekerja.

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari kepala SKPD dan kepala bagian keuangan SKPD yang bekerja di Instansi Pemerintah Daerah Kota Solok diperoleh data tentang jabatan responden.

Proporsi pengelompokkan responden berdasarkan jabatan seimbang antara kepala SKPD dan kepala bagian keuangan SKPD yaitu sama-sama 50%.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari kepala SKPD dan kepala bagian keuangan SKPD yang bekerja di Instansi Pemerintah Daerah Kota Solok diperoleh data tentang jenis kelamin responden.

Proporsi pengelompokkan responden berdasarkan jenis kelamin ternyata didominasi oleh laki-laki dilihat dari kuesioner yang diisi oleh 26 orang laki-laki atau 54,55% dan selebihnya diisi oleh perempuan.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari kepala SKPD dan kepala bagian keuangan SKPD yang bekerja di Instansi Pemerintah Daerah Kota Solok diperoleh data tentang tingkat pendidikan responden.

Terlihat bahwa tingkat pendidikan responden yang terbanyak adalah pada tingkat Strata 1 (S1) dengan persentase sebesar 56,82% atau sebanyak 25 orang. Selanjutnya pada tingkat Strata 2 (S2) sebanyak 13 orang atau sebesar 29,54%. Untuk responden yang tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Diploma 1 (D1) tidak ada. Responden yang tamatan Diploma 3 (D3) dengan persentase 13,64% atau sebanyak 6 orang. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa pada umumnya Kepala SKPD dan Kepala Bagian Keuangan SKPD yang bekerja di Instansi Pemerintah Daerah Kota Solok yang menjadi responden berpendidikan paling banyak pada Strata 1 (S1).

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari kepala SKPD dan kepala bagian keuangan SKPD yang bekerja di Instansi Pemerintah Daerah Kota Solok diperoleh data tentang lama bekerja.

Terlihat bahwa pada umumnya kepala SKPD yang menjadi responden dalam penelitian ini memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun yaitu sebanyak 28 orang (63,64%), dan untuk masa kerja kurang dari 5 tahun berjumlah 6 orang (13,63%), sementara itu terdapat 10 orang yang memiliki masa kerja 5 sampai 10 tahun (22,73%).

1. Deskripsi Variabel Penelitian

Berikut ini merupakan deskripsi dari hasil penelitian tentang pengaruh Moralitas, Motivasi dan Sistem Pengendalian Intern Aparatur Pemerintah terhadap tingkat Kecurangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Solok. Untuk mendeskripsikan variabel-variabel tersebut dapat dikategorikan dalam:

1. Distribusi Variabel Moralitas

Distribusi frekuensi skor moralitas terdiri dari indikator 1) Tingkat keserakahan (*greed*). 2) Berperilaku sesuai dengan pedomannya. Jumlah item pertanyaan adalah 6 item dengan 1 kasus.

Dari 44 responden yang diteliti terlihat bahwa tingkat capaian responden tertinggi yaitu dengan nilai 84,09%, sedangkan tingkat capaian responden terendah yaitu dengan tingkat capaian responden 76,84%. Tingkat capaian rata-rata dari moralitas adalah sebesar 82,50%. Hal ini menunjukkan bahwa moralitas aparatur pemerintah Kota Solok di nilai cukup dalam berperilaku baik atau moralnya masih rendah. Untuk berperilaku jujur dan mematuhi peraturan-peraturan belum sepenuhnya diterapkan dalam pemerintahan. Aparatur pemerintah lebih takut terhadap pimpinannya dari pada patuh terhadap Peraturan Pemerintah (PP) sekalipun pimpinannya berperilaku buruk.

2. Distribusi Variabel Motivasi

Distribusi frekuensi skor motivasi terdiri dari indikator yang diambil dari 3 pernyataan tentang

motivasi yaitu tingkat kebutuhan (*need*), keinginan untuk menguasai aset dan adanya tekanan (*pressure*). Jumlah item pertanyaan adalah 6 item.

Dari 44 responden yang diteliti terlihat bahwa tingkat capaian responden tertinggi yaitu dengan nilai 87,27%, sedangkan tingkat capaian responden terendah yaitu dengan tingkat capaian responden 66,36%. Sedangkan tingkat capaian rata-rata dari motivasi adalah sebesar 73,48%. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi dari aparatur pemerintah dinilai cukup atau dorongan untuk mencapai tujuan organisasi masih tergolong rendah. Terbukti dari pimpinan masih sering mengambil keputusan kerja lembur apabila laporan keuangan belum selesai, berarti aparatur pemerintah belum mampu menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Akibatnya motivasi negatif atau perilaku yang mengutamakan kepentingan pribadi dan mengorbankan kepentingan organisasi akan terjadi.

3. Distribusi Variabel Sistem Pengendalian Intern

Distribusi frekuensi skor sistem pengendalian intern indikatornya adalah lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan

Dari 44 responden yang diteliti terlihat bahwa tingkat capaian responden tertinggi yaitu dengan nilai 84,55%, sedangkan tingkat capaian responden terendah yaitu dengan tingkat capaian responden 72,73%. Sedangkan tingkat capaian rata-rata dari sistem pengendalian intern adalah sebesar 78,39%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern sudah di nilai baik untuk kategori tertentu. Tapi ada beberapa kategori yang belum di nilai baik atau masih kurang. Instansi belum mampu melakukan pengawasan secara terus menerus karena masih lemahnya kualitas pengendalian intern. Disamping itu kepala SKPD belum mampu menciptakan kepemimpinan yang kondusif. Maksudnya aparatur pemerintah belum mampu menciptakan kepemimpinan yang stabil atau kepemimpinan yang bijaksana. Hal ini disebabkan karena kepala SKPD belum menetapkan tingkat kompetensi. Maka dari itu belum tercipta kepemimpinan yang kondusif.

4. Distribusi Variabel Kecurangan Laporan Keuangan Pemerintah

Distribusi frekuensi skor kecurangan laporan keuangan pemerintah indikatornya adalah *timing difference, fictitious revenues, concealed liabilities and expense, inadequate disclosure, improper asset valuation, cash fraud, fraud of inventory and all, conflict of interest, bribery, illegal gratuity*.

Dari 44 responden yang diteliti terlihat bahwa tingkat capaian responden tertinggi yaitu dengan nilai 86,36%, sedangkan tingkat capaian responden terendah yaitu dengan tingkat capaian responden 75,91%. Sedangkan tingkat capaian rata-rata dari kecurangan dalam laporan keuangan adalah sebesar 82,81%. Hal ini menunjukkan bahwa instansi pernah melakukan tindakan kecurangan yang dapat dibuktikan dari instansi pernah melakukan pencatatan fiktif dan melakukan pencatatan tanggal transaksi yang tidak sesuai dengan waktu transaksi yang sebenarnya. Terbukti juga dari instansi pernah melakukan pengeluaran-pengeluaran yang ilegal atau yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah. Dengan adanya tindakan-tindakan diatas maka kecurangan di instansi pemerintah pernah terjadi atau pernah dilakukan.

2. Statistik Deskriptif

Sebelum dilakukan pengujian data secara statistik dengan lebih lanjut, terlebih dahulu dilakukan pendeskripsian terhadap variabel penelitian. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran tentang masing-masing variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah moralitas, motivasi dan sistem pengendalian intern sedangkan variabel terikatnya adalah tingkat kecurangan dalam laporan keuangan pemerintah.

3. Uji Valid dan Reliabilitas

1. Uji Reliabilitas

Untuk uji reliabilitas instrumen, semakin dekat koefisien keandalan dengan 1,0 maka akan semakin baik. Secara umum, keandalan kurang dari 0,60 dianggap buruk, keandalan dalam kisaran 0,70 bisa diterima, dan lebih dari 0,80 adalah baik (Sekaran, 2006:182).

Keandalan konsistensi antar item atau koefisien keandalan *Cronbach's Alpha* yang terdapat pada tabel diatas yaitu untuk instrumen moralitas 0,876, untuk instrumen motivasi 0,955,

untuk instrumen sistem pengendalian intern 0,902 dan untuk instrumen tingkat kecurangan dalam laporan keuangan pemerintah 0,915. Data ini menunjukkan nilai yang berada pada kisaran diatas 0,6. Dengan demikian semua instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel.

2. Uji Validitas

Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner, digunakan *Corrected Item-Total Correlation*. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka data dikatakan valid, dimana r_{tabel} untuk $N = 44$, adalah 0,204. Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan bahwa nilai *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing item variabel X_1 , X_2 , X_3 dan Y semuanya di atas r_{tabel} . Jika dapat dikatakan bahwa seluruh item pernyataan variabel X_1 , X_2 , X_3 dan Y adalah valid.

Untuk instrumen moralitas diketahui nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil 0,505, untuk instrumen motivasi nilai terkecil 0,595, untuk instrumen sistem pengendalian intern nilai terkecil 0,442 dan untuk tingkat kecurangan dalam laporan keuangan pemerintah dengan nilai terkecil sebesar 0,481.

4. Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis untuk pernyataan penelitian. Dalam melakukan analisis digunakan teknik regresi berganda. Kegiatan perhitungan statistik menggunakan SPSS versi 16. Sebelum data diolah dengan regresi berganda maka uji asumsi klasik untuk memperoleh keyakinan bahwa data yang diperoleh beserta variabel penelitian layak untuk diolah lebih lanjut. Uji asumsi klasik yang dilakukan terdiri dari:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, dengan taraf signifikan 0,05 atau 5%. Jika signifikan yang dihasilkan $> 0,05$ maka distribusi datanya dikatakan normal. Sebaliknya jika signifikan yang dihasilkan $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi secara normal.

Hasil uji normalitas menyatakan nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 1,026 dengan signifikan 0,243. Berdasarkan hasil tersebut dapat

dinyatakan data yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi normal dan bisa dilanjutkan untuk diteliti lebih lanjut, karena nilai signifikan dari uji normalitas $> 0,05$.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance value* untuk masing-masing variabel independen. Apabila *tolerance value* di atas 0,10 dan $VIF < 10$ maka dikatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas.

Diperoleh nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas kurang dari 10 dan *tolerance value* berada di atas 0,10. Hal ini menunjukkan tidak adanya korelasi antara sesama variabel bebas dalam model regresi dan disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinearitas diantara sesama variabel bebas dalam model regresi yang dibentuk.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji *Glejser*. Pengujian ini membandingkan signifikan dari uji ini apabila hasilnya $\text{sig} > 0,05$ atau 5%. Jika signifikan di atas 5% maka disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Tidak terdapat variabel yang signifikan dalam regresi dengan variabel AbsUt. Tingkat signifikansi $> \alpha 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas.

5. Hasil Penelitian

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi bertujuan untuk melihat atau mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Dari tampilan *output SPSS model summary* besarnya *Adjusted R Square* adalah 0,280. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel

moralitas, motivasi dan sistem pengendalian intern adalah sebesar 28%, sedangkan 72% ditentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

2. Analisis Regresi Berganda

Untuk mengungkap pengaruh variabel yang dihipotesiskan dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis regresi berganda. Model regresi yang digunakan terdiri dari 3 variabel bebas yaitu moralitas (X_1), motivasi (X_2), sistem pengendalian intern (X_3) dan satu variabel terikat yaitu kecurangan laporan keuangan pemerintah (Y). Analisis regresi berganda dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dan nilai sig dengan α yang diajukan yaitu 95% atau $\alpha = 0,05$.

Dari pengolahan data dengan menggunakan regresi berganda maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$KC = 10,055 - 1,050(MR) + 0,440(MT) - 0,010(SPI)$$

Angka yang dihasilkan dalam pengujian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Nilai Konstanta

Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 10,055 mengindikasikan bahwa jika variabel independen yaitu moralitas, motivasi dan sistem pengendalian intern adalah nol maka nilai pengaruh kecurangan laporan keuangan pemerintah adalah sebesar konstanta 10,055.

b. Koefisien Regresi (b) X_1

Nilai koefisien variabel X_1 yaitu moralitas sebesar 1,050 mengindikasikan bahwa setiap penurunan moralitas satu satuan akan mengakibatkan peningkatan kecurangan laporan keuangan pemerintah sebesar 1,050 satuan. Nilai koefisien β dari variabel X_1 bernilai negatif 1,050.

c. Koefisien Regresi (b) X_2

Nilai koefisien variabel X_2 yaitu motivasi sebesar 0,440 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan motivasi (negatif) satu satuan akan mengakibatkan peningkatan kecurangan laporan keuangan pemerintah sebesar 0,440 satuan. Nilai koefisien β dari variabel X_2 bernilai positif yaitu 0,440.

d. Koefisien Regresi (b) X_3

Nilai koefisien variabel X_3 yaitu sistem pengendalian intern sebesar 0,010 mengindikasikan bahwa setiap penurunan

sistem pengendalian intern satu satuan akan mengakibatkan peningkatan kecurangan laporan keuangan pemerintah sebesar 0,010 satuan. Nilai koefisien β dari variabel X_1 bernilai negatif 0,010.

Hal ini dapat membuktikan bahwa moralitas dan sistem pengendalian intern aparatur pemerintah berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan pemerintah. Motivasi aparatur pemerintah akan berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan pemerintah.

3. Uji F (*F-Test*)

Uji F dilakukan untuk menguji apakah secara serentak variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fix* atau tidak. Berdasarkan nilai sig 0,012 menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi variabel dependen, berarti model *fix* digunakan untuk uji t statistik yang menguji variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

Dari hasil analisis data yang diperoleh mengenai moralitas, motivasi dan sistem pengendalian intern terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan pemerintah dapat dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan. Hasil pengolahan statistik analisis regresi menunjukkan nilai $F = 4,500$ yang signifikan pada level 0,012. Jadi $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $4,500 > 2,61$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,012 < 0,05$. karena nilai signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi yang digunakan sudah *fix*, sehingga dapat digunakan untuk memprediksi variabel-variabel penelitian. Dari hasil pengujian juga dapat disimpulkan bahwa moralitas, motivasi dan sistem pengendalian intern secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan pemerintah.

4. Uji Hipotesis (*t-test*)

Uji t statistik (*t-Test*) bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan cara membandingkan nilai t_{hitung} dengan

nilai t_{tabel} . Nilai t_{tabel} dengan $\alpha = 0,05$ dan derajat bebas (db) = $n-k-1 = 44-3-1 = 40$ adalah 0,2021.

Berdasarkan hasil analisis maka dapat diketahui pengaruh antara variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen pada uraian berikut ini:

a. Moralitas (X_1) berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan.

Pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai sig $< \alpha 0,05$. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar $0,004 < \alpha 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 3,173 < t_{tabel} 2,2021$. Nilai koefisien β dari variabel X_1 bernilai negatif yaitu 1,050. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian sehingga H_1 dapat diterima. Dimana semakin baik moralitas maka semakin rendah tingkat kecurangan dalam laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan bahwa moralitas (X_1) berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan pemerintah.

b. Motivasi (X_2) terhadap kecurangan dalam laporan keuangan.

Pengujian hipotesis kedua dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai sig $< \alpha 0,05$. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar $0,023 < \alpha 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 2,434 > t_{tabel} 2,2021$. Nilai koefisien β dari variabel X_2 bernilai positif yaitu 0,440. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian sehingga H_2 dapat diterima. Dimana semakin tinggi motivasi negative seseorang maka semakin tinggi juga kecurangan dalam laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan motivasi negatif (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan dalam laporan keuangan pemerintah.

c. Sistem pengendalian intern (X_3) berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan.

Pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai sig $< \alpha 0,05$. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar $0,935 < \alpha 0,05$ dan nilai $t_{hitung} -0,083 < t_{tabel} 2,2021$. Nilai koefisien β dari variabel X_1 bernilai negatif yaitu -0,010. Jadi hipotesis yang telah

dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian sehingga H_3 dapat diterima. Dimana semakin baik sistem pengendalian suatu pemerintah maka semakin rendah tingkat kecurangan dalam laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan bahwa sistem pengendalian intern (X_3) berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan pemerintah.

6. Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil pembahasan lebih lanjut akan diuraikan dalam poin-poin berikut ini:

1. Pengaruh Moralitas Aparatur Pemerintah terhadap Tingkat Kecurangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa moralitas seseorang berpengaruh signifikan negatif terhadap tindakan kecurangan dalam laporan keuangan dengan $t = 3,173$ dan nilai signifikan $0,004$. Semakin rendahnya moralitas dari aparatur pemerintah maka kecurangan akan semakin meningkat.

Sejalan dengan hasil penelitian yang diperoleh dari data distribusi frekuensi untuk variabel moralitas. Dimana tingkat capaian responden untuk variabel ini adalah $82,50\%$, ini memperlihatkan bahwa nilai TCR berada pada kategori baik. Hal ini membuktikan bahwa pada umumnya aparatur pemerintah memiliki moralitas yang rendah atau belum sepenuhnya bermoral bagus. Untuk berperilaku jujur dan mematuhi peraturan-peraturan belum sepenuhnya diterapkan dalam pemerintahan. Bawahan lebih takut terhadap pimpinannya dari pada patuh terhadap Peraturan Pemerintah (PP) sekalipun pimpinannya berperilaku salah atau tidak jujur.

Salah satu faktor terjadinya kecurangan yaitu dalam organisasi tersebut terdapat perilaku pimpinan ataupun staf yang tidak sesuai dengan pedomannya. Misalnya dalam membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) harus berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Sehingga LRA menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Tetapi Laporan Realisasi Anggaran tidak dibuat dan disusun sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. LRA memperlihatkan keadaan yang baik atau seolah-olah pembangunan-pembangunan telah

sepenuhnya tercapai padahal belum berjalan dengan baik, dikarenakan adanya maksud tertentu dari pimpinan ataupun staf untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Sehingga merugikan bagi pemerintahan dan publik.

Dalam organisasi perbuatan curang dapat terjadi karena kurangnya kepedulian dari pimpinan ataupun karyawan terhadap perbuatan salah. Perbuatan salah tersebut dianggap sudah hal yang biasa atau mereka pura-pura tidak mengetahuinya. Pada kenyataannya saat ini, kecurangan dalam organisasi dapat saja terjadi misalnya salah saji dalam laporan keuangan. Sesuai dengan temuan BPK setelah melakukan audit atas Laporan Keuangan ternyata adanya nilai aset tetap yang tidak dapat diyakini kewajarannya karena belum dicatat sesuai dengan prosedur akuntansi, dan diduga aset tersebut disalah gunakan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk kepentingan pribadinya.

2. Pengaruh Motivasi terhadap Tingkat Kecurangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Solok

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi negatif berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan dengan $t = 2,434$ dan nilai signifikan $0,023$. Semakin tingginya motivasi negatif dari aparatur pemerintah maka kecurangan akan semakin meningkat.

Sejalan dengan hasil penelitian yang diperoleh dari data distribusi frekuensi untuk variabel motivasi. Dimana tingkat capaian responden untuk variabel motivasi adalah $73,48\%$, ini memperlihatkan bahwa nilai TCR berada pada kategori cukup. Hal ini membuktikan bahwa motivasi dari aparatur pemerintah untuk mencapai tujuan organisasi masih tergolong rendah. Terbukti dari pimpinan masih sering mengambil keputusan kerja lembur apabila laporan keuangan belum selesai, berarti aparatur pemerintah belum mampu menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Akibatnya ada kemungkinan laporan keuangan dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau direkayasa karena batas akhir penyerahan laporan keuangan telah habis.

Selain itu terbukti juga dari pernyataan aset secara bebas digunakan oleh para pagawai, yang

dikategorikan cukup. Hal ini menunjukkan bahwa aset milik pemerintah secara bebas digunakan oleh para pegawai untuk kepentingan pribadinya bukan untuk kepentingan dinas.

Selain itu pimpinan SKPD kurang memberikan perhatian khusus terhadap kondisi psikologis pegawainya, akibatnya pegawai yang memiliki tekanan (*pressure*) hidup misalnya memiliki utang ataupun kebutuhan (*need*) akan uang sehingga termotivasi untuk melakukan kecurangan dalam instansi tempat ia bekerja. Sesuai dengan teori *gone* yang menyatakan faktor pendorong seseorang melakukan kecurangan yaitu adanya kebutuhan (*need*) dan juga terbukti dari salah satu sasaran dari teori motivasi yaitu pemuas kebutuhan.

3. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Tingkat Kecurangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Solok

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan dengan $t = -0,083$ dan nilai signifikan 0,935. Semakin rendah sistem pengendalian intern dalam pemerintah maka kecurangan akan semakin meningkat.

Sejalan dengan hasil penelitian yang diperoleh dari data distribusi frekuensi untuk variabel sistem pengendalian intern. Dimana tingkat capaian responden untuk variabel ini adalah 78,39%, ini memperlihatkan bahwa nilai TCR berada pada kategori baik. Hal ini membuktikan bahwa penerapan sistem pengendalian intern sudah bagus. Namun pada kenyataannya saat ini sistem pengendalian intern di pemerintahan dinilai belum sepenuhnya berjalan dengan baik atau masih lemah. Hal ini terbukti dari salah satu hasil penelitian yang diperoleh bahwa, kepala SKPD tidak menetapkan tingkat kompetensi. Jawaban dari pernyataan ini dikategorikan cukup, ini berarti aparat pemerintah belum sepenuhnya menetapkan tingkat kompetensi. Seharusnya kompetensi atau penempatan orang yang ahli dibidangnya di masing-masing SKPD diterapkan dengan sepenuhnya agar tercapainya tujuan dari sistem pengendalian intern yaitu efektifitas dan efisiensinya kegiatan operasi pemerintahan.

Selain dari pernyataan diatas, lemahnya sistem pengendalian intern aparat pemerintah juga disebabkan karena kepala SKPD belum mampu menciptakan kepemimpinan yang kondusif. Hal ini terbukti dari kategori jawaban cukup. Maksudnya kepala SKPD belum sepenuhnya mampu menciptakan kepemimpinan yang bijaksana. Seharusnya seorang kepala SPKD bisa menerapkan situasi yang kondusif dalam bekerja di instansinya, agar laporan keuangan andal. Selain itu instansi tidak melakukan pengawasan secara terus menerus dan periodik dalam menilai kualitas pengendalian intern. Pernyataan ini terbukti dari jawaban yang di kategorikan cukup. Untuk mencapai pengendalian intern yang kuat, maka pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan tugas dan fungsi dari pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi dilaksanakan dan tidak terjadi tindakan kecurangan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Pengaruh Moralitas, Motivasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Tingkat Kecurangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Solok adalah sebagai berikut:

1. Moralitas aparat pemerintah berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kota Solok.
2. Motivasi negatif dari aparat pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kota Solok.
3. Sistem pengendalian intern aparat pemerintah berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kota Solok.

B. Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Dimana dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar

28%. Sedangkan 72% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Sehingga variabel penelitian yang digunakan kurang dapat menjelaskan pengaruh dari kecurangan dalam laporan keuangan.

2. Penelitian ini merupakan metode survei menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan. Sebaiknya dalam mengumpulkan data dilengkapi dengan menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis.

C. Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa moralitas yang baik/bagus dari aparatur pemerintah perlu ditingkatkan, sedangkan motivasi negatif dari aparatur pemerintah untuk melakukan kecurangan perlu dikurangkan dan sistem pengendalian intern dalam instansi perlu dikuatkan agar tingkat kecurangan bisa diminimalkan. Untuk mencegah kecurangan terjadi di instansi, sebaiknya dimulai sejak menerima seseorang (*recruitment process*) yang dilakukan melalui seleksi yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sehingga pegawai yang diangkat/diambil benar-benar yang berkompeten di bidangnya.
2. Penelitian ini masih terbatas pada moralitas, motivasi dan sistem pengendalian intern aparatur pemerintah terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menambah variabel penelitian seperti kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi dan variabel-variabel lainnya yang mungkin berpengaruh kuat dengan kecurangan dalam laporan keuangan.
3. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu dimana kepala SKPD belum sepenuhnya mengerti tentang pentingnya pengendalian intern untuk menurunkan tingkat kecurangan, namun jawaban dari kepala SKPD telah mampu menerapkan pengendalian intern. Jadi dalam penelitian ini masih terdapat kelemahan yaitu ada beberapa responden yang mengisi kuesioner penelitian yang tidak sesuai dengan kondisi

yang sesungguhnya, maka untuk penelitian selanjutnya selain menggunakan kuesioner dilakukan interview/bertanya langsung ke responden secara tegas dan jelas untuk mendapatkan data/informasi yang benar dan dengan pemaparan kasus pada kuesioner moralitas responden kurang bisa memahami pernyataan negatif dan pernyataan negatif lainnya pada kuesioner kecurangan, sehingga kemungkinan responden menjawab tidak tepat. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya lebih banyak memaparkan pernyataan positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrizal. 2004. *Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan oleh Internal Auditor*. Melalui www.google.com. Diakses tanggal [12 agustus 2011].
- Arens, Alfin A. Randal J. Elder & Mark S. Beasley. 2008. *Auditing & Assurance Services An Integral Approach*. Jakarta: PT. Indeks
- Arikunto, Suharsmi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Association of Certified Fraud Examiners. 2004. *Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse*. ACFE.
- Aviora, Arie Anggriana. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecurangan Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur di Sumatera Barat*. Padang : Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta.
- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. 2007. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah kota Solok untuk Tahun 2009 di Solok*. Melalui

- www.bpk.com. Diakses tanggal [20 November 2011].
- Bastian, Indra. 2003. *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Elangga.
- Bertens, K. 1993. *Etika*. Jakarta : Gramedia.
- BPKP. 2003. *Kumpulan Modus Operandi Kasus yang Berindikasi Merugikan Keuangan Negara*. Jakarta: Deputi Bidang Investigasi.
- Budiningsih, Asri C. 2004. *Pembelajaran Moral*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Gomes, Faustino Cardoso. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi.
- Ghozali, Iman. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indriantoro, Nur & Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Kartono, Kartini. 2002. *Psikologi Sosial untuk Manajemen Perusahaan dan Industri*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Koletar, Joseph. W. 2003. *Fraud Exposed*. New York: John Wiley and Sons, Inc.
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2009. Melalui www.bpk.com. Diakses tanggal [29 juni 2011].
- Nani, Wiliya. 2010. *Pengaruh Moralitas, Motivasi dan Sistem Pengendalian Intern Aparatur Pemerintah Terhadap Tingkat Kecurangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang*. Skripsi. Universitas Negeri Padang.
- Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Salam, Burhanudin. 2000. *Etika Individual (Pola Dasar Filsafat Moral)*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Santoso, Singgih. 2000. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Sawyer, Laurence. B. 1981. *The Practice of Modern International Auditing*. New York : The Institute of Internal.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.
- Siagian, Sondang. 2004. *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Simanjuntak, Ridwan. 2008. *Pengertian dan Pencegahan Kecurangan*. Seri Departemen Akuntansi : FEUI.
- Singleton, Tommie, et.al. 2006. *Fraud Auditing and Forensic Accounting*. Canada : John Wley and Sons, Inc.
- Sugiyono. 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Suhermadi, Bambang. 2006. *Management Fraud*. Melalui <http://internal.dsuc.co.id/managementFraud>. Diakses tanggal [25 Mei 2011].

- Tuanakotta, Theodorus. M. 2007. *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif*. Seri Departemen Akuntansi : FEUI.
- William, Boynton. 1996. *Modern Audit*. Edisi 7 Jilid 1. New York : John Wiley and Sons, Inc.
- Wilopo. 2006. *Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi : Studi pada Perusahaan Publik dan BUMD di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang. Melalui www.google.com. Diakses tanggal [25 Januari 2011].
- Winardi, J. 2001. *Motivasi dan Pemotivasian dalam Manajemen*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Moralitas	44	20.00	35.00	55.00	45.55	5.761
Motivasi	44	15.00	19.00	30.00	24.75	3.356
Sistem Pengendalian Intern	44	23.00	9.00	29.00	22.05	5.357
Kecurangan Laporan Keuangan	44	28.00	36.00	75.00	58.80	7.819
Valid N (listwise)	44					

Instrumen Variabel	Nilai Cronbach's Alpha
Kecurangan dalam laporan keuangan pemerintah (Y)	0,915
Moralitas (X ₁)	0,876
Motivasi (X ₂)	0,955
Sistem pengendalian intern (X ₃)	0,902

Instrumen Variabel	Nilai Corrected Item-Total Correlation terkecil
Tingkat kecurangan dalam laporan keuangan pemerintah (Y)	0,481
Moralitas (X ₁)	0,505
Motivasi (X ₂)	0,595
Sistem Pengendalian Intern (X ₃)	0,442

		Unstandardized Residual
N		44
Normal Parameters(a,b)	Mean	.0000000
	Std. Deviation	5.55537864
Most Extreme Differences	Absolute	.155
	Positive	.155
	Negative	-.115
Kolmogorov-Smirnov Z		1.026
Asymp. Sig. (2-tailed)		.243

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	MR	.877	1.140
	MT	.937	1.067
	SPI	.911	1.098

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.933	5.814		1.364	.180
	MR	-.272	.162	-.271	1.677	.101
	MT	-.068	.098	-.108	-.692	.493
	SPI	.080	.068	.185	1.163	.252

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.600(a)	.360	.280	4.641

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.055	10.006		1.005	.325
	Moralitas	1.050	.331	.619	3.173	.004
	Motivasi	.440	.181	.441	2.434	.023
	Sistem Pengendalian Intern	-.010	.120	-.015	-.083	.935

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	290.822	3	96.941	4.500	.012(a)
	Residual	517.035	24	21.543		
	Total	807.857	27			